

**PELAKSANAAN PEMBINAAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS OLEH
DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

ANDRIO PURNAMA DAN FEBRI YULIANI

Andriopurnama68@gmail.com

CP: 085278782433

**Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5
Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Social Service Pekanbaru function is to provide guidance to the Homeless and beggars by providing socialization, skills and decent jobs so that they do not return to beg in the streets, while the types of skills that are given Social Service pekanbaru form, though the skills of food, craft-making skills, the skills to make cakes and skills shoe soles.

There are some barriers Social Service Pekanbaru to exercise Homeless and beggars in coaching to guide the Homeless and beggars in because of the limited budget and limited space for development due to the Social Service Pekanbaru not have the permanent place to stop coaching Implementation activities Homeless and beggars.

The concept of the theory that researchers use the concept of organizational development coaching goal itself to gain awareness in a person must know himself, herself to be able to change someone better, more advanced, more positive. Without knowing yourself, too difficult or even impossible someone would change himself.

This study uses qualitative research methods to study descriptive data. In collecting the data, researchers use interviewing techniques, observation and study of literature. By using key informants and informant as a supplementary source of information.

These results indicate that the guidance provided Social Service Pekanbaru is insufficient it can be seen from the number of Homeless and beggars in the city of Pekanbaru lack of permanent shelters for conducting the implementation of the guidance.

Keywords: *Implementation of coaching Homeless and beggar*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan di Indonesia berdampak terhadap meningkatnya arus urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota-kota besar, sehingga terjadi kepadatan penduduk dan daerah-daerah kumuh yang menjadi pemukiman para urban tersebut. sulit dan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan menyebabkan banyak masyarakat di Indonesia yang mempertahankan hidup dengan terpaksa menjadi gelandangan dan pengemis. Gelandangan dan Pengemis merupakan salah satu kesenjangan sosial yang muncul dalam masyarakat di Indonesia. Hampir seluruh kota-kota besar yang ada di Indonesia di jamuri dengan gelandangan dan Pengemis.

Gelandangan adalah seorang yang hidup dalam keadaan tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap dan mengembara ke tempat umum sehingga hidup tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat.

Pengemis adalah seorang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapat belas kasihan orang lain

Sedangkan gelandangan pengemis adalah seseorang yang hidup menggelandang dan sekaligus mengemis. Oleh karena tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal dibawah kolong jembatan, taman umum dan pinggir jalan bahkan berbagai fasilitas umum lain untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.

Faktor penyebab dari gepeng (gelandangan dan pengemis) Masalah sosial tidak bisa dihindari keberadaanya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada di daerah perkotaan adalah masalah gelandangan dan pengemis. Permasalahan sosial gelandangan dan pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti hal hal kemiskinan, pendidikan rendah, minimnya keterampilan kerja yang di miliki, lingkungan, sosial budaya, kesehatan dan lain sebagainya.

Adapun gambaran permasalahan tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

- a. Masalah kemiskinan. kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat Mengembangkan kehidupan

pribadi maupun keluarga secara layak.

- b. Masalah Pendidikan Pada umumnya tingkat pendidikan gelandangan dan pengemis relatif rendah sehingga menjadi kendala untuk memperoleh pekerjaan yang layak
- c. Masalah keterampilan kerja Pada umumnya gelandangan dan pengemis tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja
- d. Masalah sosial budaya Ada beberapa faktor sosial budaya yang mengakibatkan seseorang menjadi gelandangan dan pengemis.
- e. Rendahnya harga diri. rendahnya harga diri kepada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimiliki rasa bahu untuk meminta.
- f. Sikap pasrah pada nasib. Mereka menganggap bahwa kemiskinan adalah kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.

Kebebasan dan kesenangan hidup mengelandang ada kenikmatan tersendiri bagi orang yang hidup mengelandang. Dampak dari gelandangan dan pengemis (gepeng) Dengan adanya para gelandangan dan pengemis yang berada di tempat-tempat umum akan menimbulkan banyak sekali

masalah sosial di tengah kehidupan bermasyarakat di antaranya :

- a) Masalah lingkungan (tataruang) Gelandangan dan pengemis pada umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, tinggal di wilayah yang sebenarnya dilarang dijadikan tempat tinggal, seperti : taman, bawah jembatan dan pingiran kali. Oleh karena itu mereka di kota besar sangat mengganggu ketertiban umum, ketenangan masyarakat dan kebersihan serta keindahan kota.
- b) Masalah kependudukan Gelandangan dan pengemis yang hidupnya berkeliaran di jalan-jalan dan tempat umum, kebanyakan tidak memiliki kartu identitas (KTP/KK) yang tercatat di kelurahan (RT/RW) setempat dan sebagian besar dari mereka hidup bersama sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- c) Masalah keamanan dan ketertiban Maraknya gelandangan dan pengemis di suatu wilayah dapat menimbulkan kerawanan sosial mengancam keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.
- d) Masalah kriminalitas Memang tak dapat kita sangkal banyak sekali faktor penyebab dari kriminalitas ini dilakukan

oleh para gelandangan dan pengemis di tempat keramaian mulai dari pencurian kekerasan hingga sampai pelecehan seksual ini kerap sekali terjadi.

Negara adalah sekumpulan masyarakat dengan berbagai keragaman yang hidup dalam suatu wilayah yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. Fungsi Negara secara garis besar sebagai berikut:

- a) Melaksanakan ketertiban, maknanya Negara mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil juga mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat, dengan tercipta ketertiban segala kegiatan akan di lakukan oleh warga Negara dapat dilaksanakan.
- b) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, maknanya Negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera terutama dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.
- c) Fungsi pertahanan, maknanya Negara berfungsi mempertahankan kelangsungan hidup suatu bangsa dari setiap ancaman dan gangguan yang timbul dari dalam maupun datang

dari luar negeri. Ancaman dan gangguan tersebut mungkin berupa serangan (invasi) dari luar negeri maupun golongan-golongan dari dalam negeri yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

- d) Menegakkan keadilan, maknanya Negara berfungsi menegakkan keadilan bagi seluruh warganya meliputi seluruh aspek kehidupan (ideology, politik, ekonomi dan sosial budaya). Upaya yang dilakukan antara lain menegakkan hukum melalui badan-badan peradilan.

Dari point fungsi Negara diatas terutama point yang kedua nyaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya nyatanya belum terlaksana karna sebagian dari wilayah Indonesia yang tidak terpisahkan, Provinsi Riau tidak Luput dari keberadaan Gelandangan dan Pengemis dan Ibu Kota Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang di Jamuri oleh keberadaan Gelandangan dan Pengemis. Kehidupan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru berdampak pada berbagai masalah sosial, masalah umum gelandangan dan pengemis pada hakikatnya erat terkait pada masalah ketertiban dan yang mengganggu ketertiban dan keamanan di daerah perkotaan.

Seiring dengan faktor sosial, hal ini tentunya berkaitan dengan

faktor ekonomi dimana kemiskinan merupakan salah satu faktor yang adanya gelandangan dan pengemis. Tingginya tingkat kompetisi masyarakat membawa pengaruh pada beragamnya pola kehidupan masyarakat. Adapun penyebab para gelandangan dan pengemis ini memilih Kota Pekanbaru sebagai lokasi untuk menggelandang dan mengemis adalah karena faktor tingkat pendapatan yang mereka peroleh selama menggepeng lebih tinggi jika dibandingkan dengan kota lain.

Terkait dengan masalah gelandangan dan pengemis, kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial. Adapun alasan dikeluarkannya Perda No. 12 Tahun 2008 ini adalah untuk mengatasi permasalahan masalah kesejahteraan di Kota Pekanbaru, yang dalam penelitian ini akan difokuskan pada pembinaan gelandangan dan pengemis.

Masih beraktivitasnya gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru. Hal ini menimbulkan keresahan pada masyarakat di Kota Pekanbaru, karena gelandangan dan pengemis ini kerap mengganggu aktivitas masyarakat Kota Pekanbaru dan mengganggu ketertiban umum. Aktivitas ini biasa dilakukan diemperan toko, persimpangan lampu merah, jembatan penyebrangan, pasar tradisional dan juga rumah-rumah makan atau restoran. Banyak hal yang menyebabkan gelandangan dan

pengemis ini masih bisa melakukan aktivitasnya, diantaranya adalah kurang tegasnya pelaksanaan penegasan sanksi hukum bagi gelandangan dan pengemis serta bagi masyarakat yang memberikan sumbangan dijalanan

Untuk mengatasi permasalahan dan dampak yang akan ditimbulkan oleh kegiatan gelandangan dan pengemis ini, maka Dinas Sosial Kota Pekanbaru berkewajiban untuk melakukan razia terhadap gelandangan dan pengemis.

Menurut data dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru, para gelandangan dan pengemis yang telah mengikuti pembinaan dan pelatihan tersebut juga masih ada yang terjaring razia beberapa kali dan kembali melakukan kegiatan menggelandang dan mengemis, fenomena ini tentunya menjadi perhatian dari berbagai pihak.

Pembinaan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial di Kota Pekanbaru sampai saat ini belum juga tuntas, dan pada awal Tahun 2013 keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru terlihat semakin banyak, mereka selalu terlihat disetiap persimpangan jalan dan di Traffic Light. hal ini menunjukkan bahwa belum optimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang

terjadi. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membuat gambaran dan hubungan antara fenomena yang diselediki. Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebas, tapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya.

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial kota pekanbaru. Dalam wawancara yang dilakukan dengan informan, peneliti menggunakan metode *Snowball Sampling*. Metode *Snowball Sampling* adalah metode penentuan sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder sesuai dengan pengelompokan informasi atau data yang telah diperoleh. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan *key informan* dan informan-informan susulan penelitian mengenai pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial kota pekanbaru,serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi

pelaksanaan pembinaan Gelandangan dan Pengemis di kota Pekanbaru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian pada Dinas Sosial Kota pekanbaru yang mengenai Pelaksanaan pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian telah terkumpul sejumlah data yang diperlukan. Meliputi data mengenai pelaksanaan pembinaan Gelandangan dan Pengemis di kota Pekanbaru.

A. Pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh dinas sosial kota pekanbaru

Penelitian ini menganalisa tentang pelaksanaan pembinaan yang diberikan terhadap Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia di Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap gelandangan dan pengemis maka dilakukan beberapa orang informan yang merupakan pegawai Dinas Sosial Kota pekanbaru.

(Kasi Rehabilitasi Dinas Sosial kota Pekanbaru) . Kami dari Dinas sosial kota pekanbaru melakukan pembinaan dengan memberikan sosialisasi dan keterampilan terhadap gelandangan dan pengemis yang terjaring razia sebagai berikut:

- a) Memberikan keterampilan olah pangan
- b) Memberikan keterampilan membuat kerajinan
- c) Memberikan keterampilan membuat aneka kue
- d) Memberikan keterampilan sol sepatu

Dari pembinaan diatas dalam bentuk keterampilan kami selaku dinas sosial kota pekanbaru berharap dengan diberikannya keterampilan tersebut terhadap Gelandangan dan Pengemis dapat memperoleh kesadaran agar tidak menggemis lagi, mampu merubah untuk menjadi lebih baik dan lebih lebih maju, Setelah keluar dari pembinaan tidak lagi melakukan tindakan menggemis agar dan menjadi manusia yang berguna berperan aktif dan kreatif mampu mendekatkan diri kepada tuhan yang maha esa dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. pembinaan tidak akan berjalan maksimal kalau tidak ada Komunikasi yang baik antara Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan satuan Polisi pamong praja, karna tugas dari satuan polisi pamong praja adalah merazia atau menangkap gelandangan dan pengemis yang ada di pekanbaru lalu di serahkan ke pada dinas sosial kota pekanbaru untuk di berikan pengarahan atau pembinaan agar gelandangan dan pengemis bisa menjadi manusia yang seutuhnya tidak mengharap belas kasihan orang lain dan untuk mandiri.

B. Pembinaan yang baik

Pembinaan adalah untuk merubah seseorang untuk menjadi baik dan

mampu untuk hidup mandiri, ini berkenaan dengan bagaimana tujuan yang di sosialisasikan kepada organisasi atau publik dan manfaat dari tujuan itu. Bentuk pembinaan yang digunakan dalam pelaksanaan pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial kota pekanbaru 2013 adalah :

1) Pembinaan Mental Hal ini menjadi perhatian utama karena fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru jika dilihat dari factor cultural bahwa gelandangan dan pengemis memiliki watak tidak produktif, enggan berubah dan merasa nyaman dalam kemiskinan karena mereka dengan mudah menghasilkan uang dengan meminta-minta dijalanan dan mereka tidak lagi mersa malu dalm melaksanakan aktivitas menggengnya, karena selain mudah penghasilannya juag lumayan. Tujuan pembinaan ini adalah untuk memotivasi para gepeng untuk mengurangi tingkat kemalasan, adanya rasa malu ketika melakukan aktivitas tersebut.

2) Pembinaan Pemberian Keterampilan
Pembinaan pemberian keterampilan yang dilakukan selama ini merupakan kegiatan suplemen atau tambahan dari pembinaan mental yang dilakukan, pemberian pelatihan ini dilakukan bagi para gelandangan dan pengemis yang mau mengikuti meningkatkan kesadaran, harga diri dan kepercayaan terhadap diri sendiri serta arti pentingnya bekerja.

Tujuan pelaksanaan pembinaan ini untuk tercapainya tujuan Kota Pekanbaru bebas dari Gelandangan dan Pengemis.

Dengan demikian tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan pembinaan dapat di lihat dari sejauh mana sudah dilakukan nya razia dan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis oleh pihak-pihak yang melakukan pembinaan tersebut.

C . Program pelaksanaan pembinaan

1. Program umum.

memperoleh pelayanan selama 6 bulan atau disesuaikan dengan tingkat permasalahan klien Program pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis (gepeng) diselenggarakan melalui sistem Panti. Panti merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial mengutamakan profesi pekerjaan sosial dan dilengkapi dengan profesi medis, para medis, psikolog serta instruktur ketrampilan kerja yang jumlah dan kualitasnya disesuaikan dengan jumlahk lienyang ada. Para penyandang masalah sosial gepeng, serta orientasi kebutuhan di masyarakat.

Program ini memiliki sasaran utama penyandang masalah sosial gepeng (Gelandangan dan Pengemis)yang berusia produktif serta mempunyai motivasi tinggi untuk mengikuti program

pelayanan dan rehabilitasi .Proses pelayanannya meliputi:

- a. PendekatanAwal.
- b. Penerimaan
- c. Assesment
- d. Bimbingan
- e. Resosialisasi
- f. BimbinganLanjut
- g. Terminasi

2. SasaranProgram

- a. Gelandangan dan Pengemis (gepeng)
- b. Anak-anak dari gepeng (gelandangan dan pengemis)
- c. Pemulung yang menggelandang di jalanan
- d. Pedagang Asongan yang menggelandang dijalanan
- e. Lingkungan Sosial klie

Adapun Kriteria Sasaran

Pelayanan sebagai berikut :

- a. Sehat rohani dalam arti tidak berpenyakit jiwa/ ingatan
- b. Sehat jasmani dalam arti tidak berpenyakit menular atau cacat berat
- c. Tidak sedang berurusan dengan

aparat penegak hokum

- d. Usia produktif antara 17 s/d 45 tahun
- e. Sehat fisik, masih mampu berkerja

Program dapat dikatakan sebagai sebuah rencana yang didalamnya mencangkup sejumlah usaha yang ingin dilakukan walaupun tidak

semuanya bisa direalisasikan. Sebuah program besar dapat didefinisikan sebagai rencana komprehensif yang meliputi penggunaan macam-macam sumber daya untuk masa yang akan datang dalam sebuah pola yang terintegrasi dan menetapkan suatu urutan masing-masing tindakan tersebut dalam rangka usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan (pekanbaru terbebas dari Gelandangan dan pengemis)

Bahwa ada tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan program :

- a. Perspektif yang menilai keberhasilan pelaksanaan program dari aspek kepatuhan aparat birokrat bawahan kepada birokrat atasannya, atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandat/kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang.
- b. Keberhasilan pelaksanaan program dari segi berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam pelaksanaan program dan tidak adanya konflik. Kedua perspektif ini mendefinisikan keberhasilan pelaksanaan program dari segi proses.
- c. Keberhasilan pelaksanaan program dilihat dari segi pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program.

Sebagaimana diketahui bahwa program dapat didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan-kegiatan nyata,

sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya program yang terorganisir dengan baik maka semua tujuan program tersebut akan tercapai,

D. Pembagian tugas Dinas Sosial terkait pelaksanaan pembinaan Gelandangan dan Pengemis

Pembagian tugas merupakan pemecahan sedemikian rupa sehingga petugas yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan yang mereka laksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian tugas harus mengarah kepada keadilan yang mencerminkan distribusi yang relevan untuk penerimaan penghargaan dan keputusan dimana hal ini dapat mempengaruhi penampilan diri dan kualitas kerja. Idealnya pembagian tugas dalam suatu organisasi didasarkan kepada prinsip pembagian tugas yang jelas, penempatan pegawai sesuai dengan bidang kemampuannya sendiri agar bertanggung jawab dengan kewajiban nya sendiri.

Berdasarkan kutipan wawancara yang peneliti lakukan, dapat dilihat bahwa Satpol pp sebenarnya mengetahui tugas dan fungsinya tetapi dalam kenyataannya dilapangan Satpol pp tidak menyerahkan dulu Gelandangan dan Pengemis ke kepolisian agar dapat diproses terlebih dahulu ke pengadilan tetapi alasan satpol pp juga dapat diterima menurut penulis karena terlalu lama proses ke kepolisian dan ke pengadilan dulu untuk Gelandangan dan Pengemis yang terjaring razia dan dinas sosial juga belum memiliki tempat pembinaan yang cukup untuk menampung dan membina gelandangan dan pengemis dikarenakan tempat persinggahan yang sekarang hanya bersifat sementara dan belum mampu menampung Gelandangan dan Pengemis yang telah diamankan oleh satpol PP.

Jika semua unsur-pelaksana yang terlibat dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis ini dapat berkordinasi dan menjalankan fungsinya masing-masing, maka keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru dapat di atasi, akan tetapi fakta dilapangan menunjukan bahwa belum semua unsur pelaksanaan pembinaan gelandangan dan Pengemis belum berjalan dengan maksimal dikarenakan Gelandangan dan Pengemis yang telah diberikan pembinaan mereka dilepas dan tidak diberikan pekerjaan ,maka mereka kembali lagi untuk mengemis di kota pekanbaru,

E . Kerja sama

Kerja sama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain mempunyai tugas dan tujuan yang sama. Kerja sama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adanya kerja sama harus memperhatikan prinsip-prinsip yaitu :

1. Hubungan kerja sama saling pengertian
2. Tindakan-tindakan yang selaras
3. Kesatuan tindakan

Dalam kerja sama dibutuhkan adanya saling pengertian dari personil yang bertugas maupun antara instansi terkait. Dalam menciptakan pernetiban Gelandangan dan Pengemis diperlukan kerja sama yang baik. Dengan demikian tingkat keberhasilan atau pencapain tujuan komunikasi dapat dilihat atau dinilai dari sampai dimana atau sejauh mana saling pengertian dan kesepakatan dapat tercapai oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi itu sendiri.

F. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru

- a. Kurangnya pelaksanaan perencanaan yang ditetapkan, Perencanaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru karena merupakan proses kegiatan yang telah dilakukan akan jadi lebih baik terarah dan terjadwal sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, dalam hal ini hendaknya semua pelaksanaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya,
- b) Kurangnya komunikasi antara Dinas Sosial dan Satpol PP, Komunikasi merupakan alat untuk menyampaikan informasi. Ini berkenaan dengan bagaimana tujuan yang ingin disosialisasikan kepada organisasi atau publik dan manfaat dari tujuan itu sendiri. Bentuk komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaannya Dinas Sosial dan satpol PP tentang penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru adalah komunikasi verbal. Secara sederhana, komunikasi verbal berarti komunikasi yang disampaikan secara lisan dan tulisan atauoun dengan gambar. Komunikasi dilakukan dengan tatap muka antara Dinas Sosial Kota pekanbaru dengan unsur pelaksana yang terkait yaitu Satpol PP. Dari hasil wawancara dengan pegawai

Dinas Sosial Kota Pekanbaru diketahui bahwa faktor komunikasi yang berjalan dalam pihak yang terlibat sebagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru.

- c) Tidak berjalan rutinya razia Gelandangan dan Pengemis, Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban Gelandangan dan Pengemis di Kota pekanbaru merupakan proses kegiatan telah dilakukan untuk menjadi terarah dan terjadwal sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik,

Dari pemaparan hasil wawancara dan observasi tentang kordinasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan satpol PP masalah penting adalah Struktur biokrasi yang harus sama-sama jelas dari tugas dan fungsinya masing-masing, struktur biokrasi yang berlaku adalah horizontal atau kesejajaran. Dalam struktur digambarkan dengan garis horizontal antara Satpol PP dan Dinas Sosial,kepolisian dan pengadilan merupakan badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintahan dan juga organisai-organisasi swasta yang terkait langsung dalam pembinaan Gelandangan dan Pengemis. Masing-masing lembaga mempunyai kewenangan dan fungsinya masing-masing. Satpol pp berkewenang sebagai penegak hukum menangkap atau merazia Gelandangan dan

Pengemis .kepolisian mempunyai kewenangan untuk memproses secara hukum setelah Gelandangan dan Pengemis di tangkap Satpol PP, dan diserahkan ke pengadilan untuk ditindak pidana lalu di serahkan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan Pembinaan secara mental dan pembinaan pemberian keterampilan agar setelah keluar dari Dinas Sosial mereka bisa merubah kehidupan agar menjadi manusia lebih baik dan mempunyai rasa malu untuk tergantung dan berharap belas kasihan orang lain.

SIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah berdasarkan uraian-uraian bab terdahulu terutama pada bab III maka diambil kesimpulan yang sekaligus akan menjawab tujuan diadakan penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dinilai masih kurang, dikarenakan dari kurangnya sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang berakibatkan masih banyaknya Gelandangan dan Pengemis di Kota Pekanbaru ini. kurangnya pelaksanaan pembinaan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Hal ini bisa dilihat dari indikator-indikator berikut :

a. Pembinaan yang baik

Pembinaan adalah untuk merubah seseorang untuk menjadi baik dan mampu untuk hidup mandiri, ini berkenaan dengan bagaimana tujuan yang di sosialisasikan kepada organisasi atau publik dan manfaat dari tujuan itu.

b. Program pelaksanaan pembinaan

Program pelayanan dan rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis (gepeng) diselenggarakan melalui sistem Panti. Panti merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dalam melaksanakan pelayanan dan rehabilitasi sosial mengutamakan profesi pekerjaan sosial dan dilengkapi dengan profesi medis, para medis, psikolog serta instruktur ketrampilan kerja yang jumlah dan kualitasnya disesuaikan dengan jumlahk lienyang ada. Para penyandang masalah sosial gepeng memperoleh pelayanan selama 6 bulan atau disesuaikan dengan tingkat permasalahan klien, serta orientasi kebutuhan di masyarakat.

c. SasaranProgram

- Gelandangandan Pengemis (gepeng)
- Anak-anak dari gepeng (gelandangan dan pengemis)
- Pemulung yang menggelandang di jalanan

- Pedagang Asongan yang menggelandang di jalanan
- Lingkungan Sosial klie

d. Pembagian tugas Dinas Sosial terkait pelaksanaan pembinaan Gelandangan dan Pengemis

Pembagian tugas merupakan pemecahan sedemikian rupa sehingga petugas yang ada di Dinas Sosial Kota Pekanbaru bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan yang mereka laksanakan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Pembagian tugas harus mengarah kepada keadilan yang mencerminkan distribusi yang relevan untuk penerimaan penghargaan dan keputusan dimana hal ini dapat mempengaruhi penampilan diri dan kualitas kerja. Idealnya pembagian tugas dalam suatu organisasi didasarkan kepada prinsip pembagian tugas yang jelas, penempatan pegawai sesuai dengan bidang kemampuannya sendiri agar bertanggung jawab dengan kewajiban nya sendiri.

Saran

Dari penelitian yang peneliti lakukan,peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membangun maupun dapat dijadikan masukan serta pertimbangan.

- a) Aparatur Dinas Sosial kota Pekanbaru sebagai pelaksana pembinaan gelandangan dan pengemis dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Terutama bagi pegawai dalam menjalankan fungsi pembinaan gelandangan dan pengemis. Dalam hal ini juga diperlukan kerja sama yang baik terhadap instansi-instansi terkait.
- b) Pada sumber daya manusia (SDM), dalam hal ini pegawai sebagai Pelaksana Pembinaan masih kurang karena hanya berfokus pada razia,maka dari itu perlunya penambahan pegawai dan perbaikan system kerja pegawai seperti menempatkan pegawai yang mengerti dan menguasai apa yang akan dikerjakan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi sesuai jabatan, diharapkan kepada masyarakat agar jangan cepat memberikan penilaian yang negatif dan bersifat skeptis terhadap Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di kota pekanbaru,dan masyarakat

harus lebih membantu untuk terciptanya pekanbaru bebas dari Gelandangan dan Pengemis.

Charles, O, Jones. 2001. *Pengantar Kebijakan Publik*. Rajawali : Jakarta.

Djam'an Satori. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabet, Bandung.

Harosono. 1995. *Tujuan dalam Pembinaan Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama

DAFTAR RUJUKAN

Adam, Idrawijaya 1983. *Perubahan Pengembangan Organisasi*, Bandung: Sinar Baru

Akbar, Sofyan, 2000. *Pembinaan Narapidana dan Penyalagunaan Narkoba di Rumah Tahanan Kelas II B. Siak Sri Indrapura*.

Asmaya, 2003. *Bentuk-Bentuk Pembinaan*, Penerbit Alfabet, Bandung.

Bagdan dan Taylor, moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Elekmedia Jakarta, 2004.

Budiarjo, Miriam. 1993. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Budiwarno. 2002. *Pengembangan Birokrasi*, Penerbit Obor : Yogyakarta.

Cress Well dan YM, 2006. *Metode Penelitian*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Dokumen:

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial.